



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00140/2025  
Lampiran : 1 Halaman

2 Mei 2025

Kepada Yth.

**Dewan Komisioner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djoghadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan *website* Perseroan pada hari Jumat, 2 Mei 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

  
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.  
Mahendra Wijaya  
Corporate Secretary

Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton tahun 2025, menjadikannya yang tertinggi di kawasan ASEAN.

Jakarta, HanTer - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan produksi dan serapan beras mengalami peningkatan signifikan di sektor pangan nasional, khususnya dalam hal ketersediaan stok beras yang menjadi capaian tertinggi dalam 23 tahun.

# PRODUKSI BERAS RI DIPERDIKSI TERTINGGI DI ASEAN VERSI USDA AS



MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman

hampir mencapai 3,4 juta ton, dan diperkirakan pada

malam ini sudah mencapai angka tersebut. Jika tidak

ada kendala ke depan, dalam 20 hari paling lambat,

stok kita akan mencapai 4 juta ton. Saat ini, stok

kita adalah yang tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Ini adalah angka tertinggi," kata Mentan dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Amran mengatakan tingkat serapan beras Indonesia juga menunjukkan tren positif. Dalam satu bulan terakhir, serapan beras nasional mencapai 1 juta ton, sementara total serapan dari Januari hingga April 2025 telah menembus angka 1,7 juta ton.

"Biasanya, dalam 10 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir, serapan beras kita hanya rata-rata 1,2 juta ton saja. Angka serapan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan di Indonesia," ujar Mentan.

Sesuai data USDA, Indonesia mencatatkan angka produksi beras

yang jauh melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Berikut ini adalah perkiraan produksi beras di negara-negara ASEAN meliputi Indonesia 34,6 juta ton, Vietnam 26,5 juta ton, Thailand 20,1 juta ton, Filipina 12 juta ton, Kamboja 7,37 juta ton, Laos 1,81 juta ton dan Malaysia 1,75 juta ton.

"Sesuai dengan data dari USDA (Departemen Pertanian Amerika Serikat), produksi kita diprediksi mencapai 34,6 juta ton. Angka ini meningkat signifikan dari 30 juta ton, yang menunjukkan kenaikan yang luar biasa," jelas Mentan.

Dia menambahkan, semua data itu bersumber dari USDA serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

■ Danial

## Tercatat Sudah Rp38,9 Triliun Belanja Bansos oleh Pemerintah Sejak Maret 2025

Jakarta, HanTer - Pihak Kementerian Keuangan (Kemkeu) ternyata sudah mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp38,9 triliun per 31 Maret 2025, yakni "Belanja bantuan sosial sampai dengan akhir Maret telah dibelanjakan Rp38,9 triliun, ini 28,8 persen dari APBN," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KITA Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Lanjut dia, catatan terakhir pada Februari, realisasi belanja bansos tercatat sebesar Rp25,9 triliun. Artinya, realisasi pada Maret 2025 sebesar Rp13 triliun.

Realisasi itu termasuk untuk Program Keluarga Ha-

rapan (PKH) sebesar Rp7,3 triliun yang diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian, Kartu Sembako sebesar Rp11 triliun untuk 18,3 juta KPM.

Suhasil menuturkan belanja untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp11,6 triliun yang diterima oleh 96,7 juta jiwa.

Belanja bantuan sosial untuk pendidikan terealisasi Rp1,5 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterima oleh 2,8 juta pelajar serta Rp6,7 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diterima 794 ribu mahasiswa.

Selanjutnya, juga ada belanja untuk pelaksanaan asis-

tensi dan rehabilitasi sosial serta bantuan permukiman bagi lansia, anak, penyandang disabilitas, dan korban bencana sebesar Rp800 miliar

"Seluruh realisasi belanja bantuan sosial ini on time dan juga sesuai dengan apa yang telah direncanakan," ujar Suahasil.

Sebagai catatan, belanja negara telah disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun (15,3 persen dari target).

Sebesar Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja kementerian/ lembaga (K/L) dan sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja non-K/L.

■ Danial

## FSPPB Tolak Pertamina Masuk Danantara

Jakarta, HanTer - Badan Penanaman Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang juga superholding 844 badan usaha milik negara (BUMN) terus mendapat sorotan.

Salah satu sorotan masuknya Pertamina, PLN, dan Bulog, BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam Danantara.

Hal itu dinilai bisa menjadi pintu masuk lepasnya kontrol negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat.

Kritikan tajam soal Danantara ini dikemukakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Jakarta, Kamis (1/5/2025)

Pada kesempatan itu, Arie Gumilar menyampaikan kekhawatirannya atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai bisa mengancam kedaulatan nasional.

"Pertamina, BUMN yang mengelola hajat hidup orang banyak harus dikelola langsung oleh negara, bukan masuk dalam skema korporatisasi seperti ini,"

Energy, (Forwathi) yang juga dirangkai dengan kuliah umum ekonom senior Ichsanuddin Noorsy bertajuk 'Holding Danantara dan Implikasinya ke Pertamina' bertempat di kantor Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Jakarta, Kamis (1/5/2025)

Atas pertimbangan tersebut, lanjut Arie, FSPPB secara tegas meminta pemerintah meninjau ulang keterlibatan Pertamina dalam Danantara.

"Perusahaan seperti Pertamina, PLN, dan Bulog adalah ujung tombak pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu,

kritiknya.

Arie secara tegas menyoroti pengalihan saham seri B milik Pertamina ke holding Danantara.

Menurutnya, kebijakan itu bukan sekadar restrukturisasi, tapi perubahan fundamental yang bisa membuka pintu lebih lebar bagi pengaruh kapitalis dan liberal dalam sektor energi.

Atas pertimbangan tersebut, lanjut Arie, FSPPB secara tegas meminta pemerintah meninjau ulang keterlibatan Pertamina dalam Danantara.

"Perusahaan seperti Pertamina, PLN, dan Bulog adalah ujung tombak pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu,

mereka tak layak disatukan dalam entitas bisnis yang berorientasi korporasi murni," jelasnya.

Arie bahkan mempertanyakan motif di balik pembentukan Danantara.

"Jangan-jangan ini hanya alat untuk melunasi utang negara. Kalau begitu, maka negeri ini sudah terdagai," ujar dia.

Arie kemudian mengingatkan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang seharusnya menjadi dasar utama pengelolaan energi dan sumber daya alam. Hanya dengan kendali penuh negara, energi bisa benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

■ Safari

## Anggota DPR : Perlu Langkah Nyata Kemenperin Respos Tekanan Perekonomian

Jakarta, HanTer - Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dalam merespons tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

Kemudian sesuai hasil survei LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) mencatat sebanyak 55 persen ahli menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk. Pelemahan rupiah, turunnya IHSG yang memicu trading halt, hingga lesunya pasar tenaga kerja yang ditambah prediksi kontraksi pertumbuhan ekonomi membuat kekhawatiran publik semakin meluas.

"Di tengah situasi global yang tidak menentu dan tekanan ekonomi dari dalam negeri, Kemenperin harus tampil sebagai garda depan. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Perlu langkah-langkah cepat, progresif, dan menyentuh langsung kebutuhan industri dalam negeri," kata Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian di Senayan, kemarin.

Legislator dari daerah

pemilihan (dapil) 7 Jawa Timur itu juga menyoroti sejumlah tantangan eksternal seperti ketidakstabilan geopolitik dan dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menghantam perekonomian global.

Sementara itu, dari dalam negeri, kata Novita, Indonesia masih dibayangi beban utang, defisit APBN, tekanan kurs, hingga meningkatnya gelombang PKH. Deflasi pun turut mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat.

Menurut legislator asal Trenggalek ini, situasi ini menuntut pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian untuk segera memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui strategi yang berorientasi jangka panjang. "Kita butuh stimulus fiskal yang tepat sasaran, penguatan industri manufaktur, dan percepatan transformasi digital. Hilirisasi sumber daya alam jangan berhenti, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan ketahanan pangan dan energi," ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap industri dalam negeri, pener-

apan (PKH) sebesar Rp7,3 triliun yang diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian, Kartu Sembako sebesar Rp11 triliun untuk 18,3 juta KPM.

Suhasil menuturkan belanja untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp11,6 triliun yang diterima oleh 96,7 juta jiwa.

Belanja bantuan sosial untuk pendidikan terealisasi Rp1,5 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterima oleh 2,8 juta pelajar serta Rp6,7 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diterima 794 ribu mahasiswa.

Selanjutnya, juga ada belanja untuk pelaksanaan asis-

tensi dan rehabilitasi sosial serta bantuan permukiman bagi lansia, anak, penyandang disabilitas, dan korban bencana sebesar Rp800 miliar

"Seluruh realisasi belanja bantuan sosial ini on time dan juga sesuai dengan apa yang telah direncanakan," ujar Suahasil.

Sebagai catatan, belanja negara telah disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun (15,3 persen dari target).

Sebesar Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja kementerian/ lembaga (K/L) dan sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja non-K/L.

■ Danial

## Status Ojol Sebagai UMKM Adalah Jalan Tengah Kebaikan

Jakarta, HanTer - Ekonom menilai usulan pemerintah terkait mitra pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi jalan tengah antara fleksibilitas dalam bekerja dan meraih manfaat langsung.

Head of Center Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras mengatakan gagasan ini dapat memberikan keuntungan bagi pengemudi untuk mempertahankan fleksibilitas yang selama ini mereka miliki.

Dijelaskan Izzuddin, "Jika aspek tentang kerangka kebijakan yang memastikan bahwa pengemudi ojol harus terdaftar sebagai UMKM itu ada, maka ini membuka kesempatan bagi pengemudi untuk menda-

patkan benefit sebagai pelaku usaha, misalnya terkait pelatihan literasi keuangan dan literasi digital," ujar Izzudin di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Adapun dengan menjadi bagian dari UMKM, kata dia, pengemudi ojol juga bisa memperoleh manfaat dari jaminan sosial yang lebih terjangkau.

Senada dengan Izzuddin, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mendukung gagasan ini, dengan catatan bahwa pengaturan yang lebih tepat harus berada di bawah Kementerian UMKM.

"Atas dasar itu pula, bentuk kemitraan tidak boleh seperti tenaga kerja yang mengharuskan bekerja sekian jam dan sebagainya. Aturan juga harus dibuat bersama dengan asosiasi driver dengan konsep setara, termasuk tarif," ujarnya

Sedangkan, soal usulan menjadikan para pengemudi ojol sebagai pegawai tetap, Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha menilai kebijakan itu perlu dilihat dari perspektif keberlanjutan industri serta akses masyarakat terhadap pekerjaan.

"Menjadikan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap dapat mengubah keseimbangan yang sudah ada antara fleksibilitas kerja dan akses ekonomi," katanya.

"Jika status mereka berubah, sektor ini akan kehilangan karakter inklusivitas yang membuatnya dapat diakses oleh hampir semua orang," kata Agung.

Sementara itu, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan kebijakan untuk menjadikan mitra sebagai pegawai tetap justru bisa merugikan ekosistem transportasi digital yang telah terbentuk.

■ Danial

### PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 19 Tanggal 25 April 2025, yang dibuat di hadapan Fatmiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah diambil Keputusan untuk :

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Modal Dasar Perseroan dengan melakukan perubahan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran dasar perseroan yaitu Penurunan Modal Dasar Perseroan sebagai pemenuhan atas ketentuan Angka 7 huruf b butir 4) Peraturan IX.J.1. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukakan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 2008, dari semula 275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar) saham atau senilai Rp27.500.000.000.000,- (dua puluh tujuh triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar) saham atau sebanyak-banyaknya senilai Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah).

Merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Para Pihak yang berkepentingan atau Para Kreditur yang mempunyai keberatan atas hal tersebut, harap mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan atas keputusan pengurangan modal dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada :

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  
WIKTA Tower 1&2  
Jln. D.I. Panjaitan Kav. 9-10,  
Jakarta 13340

serta ditembuskan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Jakarta, 02 Mei 2025



PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  
Direksi Perseroan

### PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN PT RUBYCON INDONESIA

PT Rubycon Indonesia, berkedudukan di Jl. Gaharu lot 222-224, Batamindo Industrial Park, Kel. Mukakuning, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini mengumumkan bahwa Rubycon Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang, telah melakukan pengambilalihan atas saham PT Rubycon Indonesia sebanyak 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) Saham Seri A.

Pengambilalihan tersebut telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan sebagaimana Surat Keputusan Kementerian Hukum Nomor AHU-0027648.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 29 April 2025.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Batam, 02 Mei 2025  
Direksi  
PT Rubycon Indonesia

### IKLAN BARIS

#### KEHILANGAN

HILANG surat tanah A/B no.725/Pondok Aren/1995. A/n.Bambang Yunianto. Lokasi Pd.Pucung TangSel

HILANG BPKB Toyota Rush 2009 Hitam Metalik (A-1732-VS) Noka:MH-FE2CK3J9K 006614, Nositr:DBJ0856 a/n:HELMINYATI